

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SELASA
19 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



COLLABONATION TOUR 'SELALU NYAMBUNG DENGAN SINYAL IM3'

BARASUARA, FIERSA BESARI, DAN
FEBY PUTRI BAKAL HIPNOTIS SAMARINDA

MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS



AW
ARIE
WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

HADIR DI SAMARINDA, KONSER COLLABONATION TOUR KAMPANYEKAN 'SELALU NYAMBUNG DENGAN SINYAL IM3'

SAMARINDA – IM3 kembali melanjutkan perjalanan Collaboration Tour. Kali ini menuju Kota Samarinda dengan menghadirkan konser musik yang menampilkan sederet musisi ternama tanah air.

Konser Collaboration Tour di Samarinda juga membawa kampanye 'Selalu Nyambung dengan Sinyal IM3'. Konser itu dalam rangka pengembangan jaringan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) untuk mendukung masyarakat di Kalimantan Timur. Sehingga, mereka dapat menikmati pengalaman berinternet yang lebih stabil dalam berbagai kegiatan seperti video streaming dan gaming.

Sebagaimana diketahui, jumlah pemancar jaringan (sites) dan kapasitas internet untuk wilayah Kalimantan Timur secara keseluruhan telah meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kini sudah menjangkau 88 persen populasi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dan 100 persen populasi masyarakat di Kota Samarinda.

Selain itu, IM3 juga menghadirkan produk unggulan paket Freedom Internet dengan Kuota Utama 9GB + Kuota Plus 6GB bagi masyarakat di Kalimantan Timur untuk dapat merasakan pengalaman bebas internetan 24 jam di mana pun dan kapan pun tanpa khawatir.

SVP Head of Region Kalimantan & Sumapa IM3 Prio Sasongko mengatakan, konser musik Collaboration Tour merupakan inisiatif IM3 untuk masyarakat Samarinda agar dapat menyaksikan langsung musisi favorit. Masyarakat Samarinda pun dapat membagikan cerita pengalaman mereka ke media sosial dengan dukungan kekuatan jaringan Indosat yang kini lebih luas dan stabil.

"Melalui produk unggulan Pa-



(Kiri-Kanan) Prio Sasongko selaku SVP Head of Region Kalimantan & Sumapa IM3, Indra Wachyudi selaku AVP Head of Kalimantan Technology IM3 & Wisnu Wardhana selaku VP Head of Media Management IM3

ket Freedom Internet, kami berharap dapat terus mendukung kebutuhan telekomunikasi dan aktivitas berinternet masyarakat di Kalimantan Timur dalam pertumbuhan ekonomi serta transformasi digital dalam segala aspek," ungkap Prio Sasongko.

Konser Musik Collaboration Tour Samarinda berlangsung di halaman parkir GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda. Musisi-musisi favorit tanah air seperti Barasuara, Fiersa Besari, dan Feby Putri akan menghibur ribuan masyarakat Samarinda yang sudah membeli tiket sejak Agustus lalu.

Setiap penonton yang membeli tiket Konser Collaboration Tour Samarinda juga akan mendapatkan Kartu Perdana Freedom Internet edisi spesial Collaboration Tour secara gratis dengan Kuota Utama 9GB + Kuota Plus 6GB untuk menikmati pengalaman bebas internetan 24 jam.

Kota Samarinda menjadi kota ke-19 Collaboration Tour setelah

sebelumnya telah sukses berkeliling Indonesia menghadirkan pengalaman pertunjukan konser penuh keseruan kepada ratusan ribu masyarakat Indonesia di beberapa kota lainnya seperti Jember, Surabaya, Padang, Jambi, Pontianak, Solo, Semarang, Serang, Pekanbaru, Medan, Bekasi, Madiun, Purwokerto, Palembang, Bantul, Pamekasan, Mataram, dan Kupang.

Acara ini diharapkan akan menjadi pengalaman yang mengesankan dari IM3 dan memperkuat posisi IM3 sebagai brand telekomunikasi pilihan bagi masyarakat di Kalimantan Timur.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai konser musik Collaboration Tour dari IM3 mulai dari kota, line up musisi, hingga info pembelian tiket, dapat mengunjungi collabonation.co.id/tour. Ikuti setiap update terbaru mengenai Collaboration dan produk serta layanan IM3 lainnya di akun Instagram @indosatim3! (ADV/MK)



PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DI KUTIM DIMINTA MAKSIMALKAN INFRASTRUKTUR SPAM BM

SAMARINDA - Selain memberikan arahan terkait target pelayanan air minum layak buat masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga tahun 2020, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kutim Rizali Hadi mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan jika pada level kabupaten semua perangkat daerah (PD) yang terkait harus berperan.

"Khususnya untuk Bappeda memastikan kebutuhan terakomodir di perencanaan, kemudian Dinas PUPR Kutim memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan, Dinkes berperan untuk mengawal kualitas air yang dilayankan dan DPMDes bertanggung jawab atas pemberdayaan SDM pengelola dan juga memastikan desa berkontribusi dalam penyelenggaraan di lokasi masing-masing," tegasnya dalam arahan di Bimtek PAMSIMAS bekerja sama dengan Lembaga Studi Ilmu Keuangan dan Pemerintahan (LSIKEP) di Ruang Emerald Floor 3 Hotel Mercure, Senin (18/9/2023).

Selanjutnya, untuk Forum

AMPL /Pokja PKP yang telah berjalan dapat dioptimalkan sebagai wadah koordinasi terkait penyelenggaraan penyediaan air minum.

Di level masyarakat, Pemerintah Desa wajib hadir dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat (SPAM BM). Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok, serta pelaporan penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

"Desa layak air bersih dan sanitasi juga menjadi tujuan SDGs Desa Nomor 6, turut menggarisbawahi bahwa Pemerintah Desa adalah bagian dari penyelenggaraan SPAM BM untuk pencapaian target air minum. Selain pembinaan dan pengawasan, dukungan pemerintah desa juga diwujudkan dalam hal penganggaran (baik untuk kegiatan fisik dan peningkatan kapasitas SDM)

serta fasilitasi kebijakan tingkat desa," jelasnya.

Kemudian, untuk Pusaran Asih Bakat (Pusat Pembelajaran Air Bersih Berbasis masyarakat) dapat memberikan kesempatan kepada desa yang memiliki SPAM BM dengan keberfungsian yang baik untuk mendapatkan bimbingan intensif tentang pengelolaan SPAM BM, tidak hanya dari perspektif pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga perspektif pengembangan kawasan desa.

"Desa-desa ini nanti diproyeksikan sebagai tempat belajar pengelolaan SPAM BM baik untuk desa lain di Kutim maupun di Kalimantan pada umumnya. Pada akhir tahun 2023 hanya ada 2 atau 3 desa yang menjadi lokasi pembinaan Pusaran Asih Bakat, namun pada tahun berikutnya dapat dilanjutkan lagi untuk mengakomodir desa-desa yang berkomitmen memajukan penyelenggaraan SPAM BM di Kutim bersama Pemkab Kutim," tutup Rizali.

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari

PEMKAB KUTIM TARGETKAN PELAYANAN AIR MINUM AMAN HINGGA 2030

SAMARINDA - Pemkab Kutai Timur (Kutim) berkomitmen memaksimalkan pelayanan air minum yang merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSI-MAS/PAMdes) bekerja sama Lembaga Studi Ilmu Keuangan dan Pemerintahan (LSIKEP) di Ruang Emerald Floor 3 Hotel Mercure, Senin (18/9/2023)

"Jadi sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), target air minum aman 100 persen diharapkan tercapai di tahun 2030 oleh Pemkab Kutim," tegas Rizali.

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua hari ini, turut menghadirkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim Zubair, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, para camat, kepala desa, Ketua BPD, Tim Pendamping UGM dan undangan lainnya yang hadir.

Rizali menambahkan hal ini juga sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang merupakan jembatan tujuan pembangunan berkelanjutan menetapkan bahwa di tahun 2024 tercapai 100 persen air minum layak, 15 persen air minum aman dan 30 persen akses air minum Perpipaan.

"Nah, menurut data bulan Agustus tahun 2023, cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua di Kabupaten Kutim mencapai 51,45 persen, dengan kualitas yang dilayankan berupa air minum layak. Namun, untuk data layanan air dari Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM) di Kutim belum dapat diketahui dengan pasti," bebernya.

Selanjutnya, Pemkab Kutim se-



jak tahun 2016 memfasilitasi terbangunnya SPAM BM, baik melalui program PAMDes maupun PAMSI-MAS. Dengan pelayanan simultan dari PDAM dan SPAM BM diharapkan target akses air minum dapat lebih cepat tercapai.

"Hingga tahun 2020 telah terbangun SPAM BM di 65 desa di Kabupaten Kutim. Namun survei yang dilaksanakan oleh BAPPEDA, pasca pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut hanya sedikit SPAM BM yang berfungsi baik. Apabila hal ini dibiarkan, maka investasi Pemkab Kutim yang telah banyak dicurahkan dalam membangun infrastruktur SPAM BM menjadi sia-sia," ulasnya.

Rizali menambahkan, ada beberapa faktor yang ditemui menjadi penyebab ketidakberfungsian infrastruktur SPAM BM di Kutim seperti faktor teknis, misal kualitas air baku tidak dapat diterima oleh masyarakat, kurangnya tekanan air yang menyebabkan air tidak dapat mengalir hingga ke pipa yang jauh, ketiadaan sumber energi untuk menggerakkan pompa.

Kemudian, faktor kapasitas SDM pengelola di mana kemampuan manajemen pengelola akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan SPAM.

Berikutnya, faktor pola pikir masyarakat, misal bahwa bantuan sistem berarti airnya harus murah

atau bahkan gratis, menyebabkan iuran tidak dapat menutup biaya operasional dan terakhir yakni faktor politik lokal, di mana air minum yang seharusnya netral terimbas intervensi politik. Contoh penggantian pengurus SPAM lama oleh pemerintah desa yang baru terpilih.

Selain faktor di atas, terdapat juga kondisi yang tidak mendukung keberlanjutan pengelolaan yaitu kurangnya dukungan aturan dan kebijakan di tingkat kabupaten serta kurangnya peran serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan SPAM BM.

"Untuk itu, pada tahun 2023 ini Pemkab Kutim berupaya membangkitkan kembali keberfungsian SPAM BM di Kutim melalui inisiasi PUSARAN ASIH BAKAT (Pusat Pembelajaran Air Bersih Berbasis masyarakat). Belajar dari pengalaman yang sudah lalu, pendekatan kali ini tidak hanya berfokus pada permasalahan pada aspek teknik sistem dan aspek pengelolaan, namun juga memastikan ikut sertanya semua pihak terkait. Penyelenggaraan SPAM merupakan tanggung jawab bersama dan hanya mungkin berhasil bila semua pemangku kepentingan berperan aktif sesuai kewajibannya," pungkaskan.

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



APBD-P PPU 2023 RP 2,15 TRILIUN, OPD DIMINTA OPTIMALKAN SERAPAN ANGGARAN



SK PJ BUPATI PPU RESMI KELUAR,
BUPATI PPU TITIP
'SERAMBI NUSANTARA'



Robbi/MediaKaltimGroup

Penandatanganan berita acara Paripurna pengesahan Raperda APBD Perubahan menjadi Perda, Senin (18/9/2023).

APBD-P PPU 2023 RP 2,15 TRILIUN, OPD DIMINTA OPTIMALKAN SERAPAN ANGGARAN

PPU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Penajam Paser Utara (PPU) 2023 telah disahkan, melalui sidang paripurna DPRD, Senin, (18/9/2023). APBD PPU 2023 naik menjadi Rp 2,15 triliun, naik 10 persen dari yang ditetapkan pada APBD 2023 Murni.

Rapat paripurna ini menjadi akhir kehadiran Bupati PPU Hamdam Pongrewa dalam periode kepemimpinan 2018-2023. Yakni Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Persetujuan bersama DPRD dan Bupati PPU terhadap Perubahan APBD 2023.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Syahrudin M Noor, mengatakan dengan telah disetujui dan disahkannya raperda ini menjadi perda, rencana pembangunan daerah tahun dapat segera dirampungkan. Kemudian diharapkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar dapat lebih

efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran.

"Semoga ini dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah di PPU," kata Syahrudin.

Dalam penyampaiannya, ditetapkan dalam APBD Perubahan PPU 2023 sebesar Rp 2.151.101.515.043. Terdapat kenaikan sebesar Rp 204.200.630.985 atau 10 persen dari target pendapatan dalam APBD Murni PPU 2023 sebesar Rp 1.946.900.884.058.

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama ini tentu mempengaruhi hal-hal yang ada pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, juga akan mempengaruhi dan memberikan dampak pada kebijakan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal memenuhi target-target sasaran pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Utamanya mencermati dan konsisten dalam menjabarkan dokumen dan arah kebijakannya.

"Di sinilah pentingnya kearifan kita bersama khususnya dua pilar utama pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menentukan program-program pembangunan ke depan," ujarnya.

Senada, Hamdam juga menegaskan pada seluruh pimpinan OPD agar dalam pengelolaan keuangan lebih berhati-hati dan cermat. Dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian terhadap program kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

"Kepada segenap jajaran Pemkab PPU untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kinerjanya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena pengabdian yang kita lakukan ini merupakan tanggung jawab kita, selaku abdi negara dan abdi masyarakat," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



Bupati PPU Hamdam saat diwawancarai usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan PPU 2023, Senin (18/9/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

SK PJ BUPATI PPU RESMI KELUAR, BUPATI PPU TITIP 'SERAMBI NUSANTARA'

PPU - Surat Keputusan (SK) penunjukan Makmur Marbun sebagai Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) telah resmi keluar. Pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (19/9/2023) di Kantor Gubernur Kaltim.

Adapun Bupati PPU Hadam Pongrewa secara langsung telah bertemu dengan Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. Ia mengungkapkan ada beberapa hal yang sempat dibahas.

"Dalam pertemuan itu santai saja. Dalam pertemuan itu kami bicara banyak hal," ujarnya saat diwawancarai usai Paripurna pengesahan APBD Perubahan PPU 2023, Selasa (18/9/2023).

Satu hal yang banyak dibahas, lanjut Hamdam, ialah soal progres pembangunan Ibu Kota Nusantar (IKN) di Kecamatan Sepaku. Dalam hal ini, keduanya telah bersepakat bahwa perwujudan rencana Presiden Jokowi itu tetap perlu dilanjutkan tanpa hambatan.

"Tentang progres pembangunan IKN. Dan memang Kita bersepakat bahwa akan saling bahu-membahu untuk memastikan bahwa IKN itu akan berpindah dengan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ungkapnya.

Satu hal yang juga dititikberatkan Hamdam dalam perbincangan di Jakarta itu ialah persiapan PPU yang terangkum dalam city branding 'Serambi Nusantara'.

Menurutnya, ini satu hal yang nantinya juga harus diperjuangkan Makmur dalam memimpin PPU. Melanjutkan setiap program pemerintahan, yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat PPU dalam menyongsong IKN.

"Saya sampaikan juga soal Serambi Nusantara, bahwa karena PPU ini tidak menjadi dari IKN. Ya kita harus juga menyiapkan diri. Harus mempersiapkan kita mau jadi apa, setelah IKN itu pindah nanti," terangnya.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



PEMILIK LAHAN KEMBALI TUTUP JALAN HAULING DI DESA BATUAH



**RDP BERSAMA DISDIKBUD,
SOROTI REALISASI TARGET
YANG MASIH MINIM**



Penutupan kembali jalan keluar masuk kendaraan pengangkut batu bara, Sabtu (16/9/2023), di Desa Batuah, Dusun Karya Baru, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

PEMILIK LAHAN KEMBALI TUTUP JALAN HAULING DI DESA BATUAH

KUKAR - Didampingi kuasa hukumnya, pemilik lahan di Desa Batuah, Dusun Karya Baru, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara menutup kembali lahan yang digunakan sebagai jalan keluar masuk kendaraan pengangkut batu bara, Sabtu (16/9/2023).

Kuasa Hukum pemilik lahan, Rizky Febryan, SH mengatakan, penutupan itu dilakukan kembali setelah, palang kayu yang sempat dipasang pada Kamis (7/9/2023) lalu dibongkar paksa oleh oknum tak dikenal.

"Ini penutupan kedua, sebelumnya sudah dibongkar oleh oknum tidak dikenal," ujar Rizky, Senin (18/9/2023).

Rizky menjelaskan, bahwa kliennya itu memiliki lahan seluas 25 ribu meter persegi. Sementara lahan yang digunakan sebagai jalan keluar masuk kendaraan tersebut sepanjang 2,1 kilometer.

Namun selama beroperasi, kliennya tak sepeser pun mendapatkan haknya. Pihak perusahaan pun tak pernah menunjukkan itikad baik kepada kliennya selama melintas di lahan tersebut.

"Perusahaan harus mengetahui ketika beroperasi melakukan pertambangan ada hak hak masyarakat yang harus dipenuhi," jelasnya.

Sebelumnya, Rizky menerangkan bahwa sejumlah pertemuan sempat dilakukan dengan perwakilan dari perusahaan. Hanya saja, pada pertemuan 30 Agustus lalu tidak menemui titik temu antara kedua belah pihak.

"Kita bahas hak hak klien kita dan kewajiban perusahaan tapi tidak ada titik temu," tambahnya. Padahal, kliennya dalam hal ini pemilik lahan hanya meminta hak-hak kliennya diberikan oleh perusahaan. Hak yang dimaksud yakni pemberian kompensasi atas penggunaan lahan sepanjang 2,1 kilometer yang dijadikan jalan keluar masuk kendaraan pengangkut batu bara.

"Sepengantungan kami sudah dipake sejak 2018, sudah 5 tahun mereka (perusahaan) beroperasi," tegasnya.

Rizky menambahkan bahwa, kliennya memiliki legalitas yang sah atas kepemilikan lahan tersebut termasuk surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah (SPPT) yang telah teregister di kecamatan dan diketahui oleh kelurahan setempat.

"Kami masih lihat apakah perusahaan punya legalitas. Ada informasi status lahan ini HPL (hak pengelolaan atas tanah) kita buktikan, kita minta SK mana," ujarnya lagi.

Sementara terkait dengan pembongkaran paksa terhadap palang yang dilakukan sebelumnya, Rizky mengaku kliennya tidak di beritahu atau informasi terlebih dahulu dan hingga detik ini kliennya masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk melakukan pertemuan maupun mediasi lanjutan.

"Persoalan ini sederhana artinya hanya bicara hak klien kami, kita uji legalitas terhadap lahan ini, kita duduk bersama kita panggil pihak berwenang," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Istimewa

RDP Komisi IV DPRD Kukar bersama Disdikbud Kukar.

RDP Bersama Disdikbud, Soroti Realisasi Target yang Masih Minim

TENGGARONG - Sejumlah catatan penting diberikan oleh Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), evaluasi kegiatan di APBD Kukar 2023 murni dan APBD Perubahan Kukar 2023.

Berdasarkan paparan data yang disampaikan Disdikbud Kukar melalui Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), memasuki bulan September 2023, realisasi pencapaian baru memasuki angka 85 persen. Realisasi ini dianggap minim, dengan alasan belum maksimalnya penagihan dari pihak ketiga.

"Karena dari perusahaan (pihak ketiga) belum melakukan penagihan, kalau ditagihkan itu tercapai 85 persen," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin, Senin (18/9/2023).

Baharuddin menyebut, seharusnya Disdikbud Kukar bisa mencapai realisasi anggaran sebesar 95 persen. Karena pengerjaan APBD Perubahan Kukar 2023 yang dimulai

pada Oktober ini.

Tugas berat pun dianggap Baharuddin, menanti Disdikbud Kukar. Mengingat adanya peningkatan anggaran hingga Rp 500 miliar di APBD Perubahan Kukar 2023 ini. Dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Komisi IV DPRD Kukar pun mencatat ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Disdikbud Kukar. Di antaranya, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, terutama di posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Maka dari itu, mendorong Disdikbud Kukar untuk melakukan penganggaran peningkatan SDM. Agar kekurangan SDM yang menjadi keluhan Disdikbud Kukar, bisa teratasi.

"Supaya ke depan tidak ada alasan kurang SDM lagi, sehingga keterlambatan kegiatan tidak ada lagi. Tentu dengan peningkatan di perubahan ini betul-betul memaksimalkan program kegiatan di Disdikbud," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Sidang Lanjutan Pengrusakan Lahan, Saksi Ahli PT MPAS Ditolak JPU

TENGGARONG - Sidang terdakwa Zulkifli, Direktur PT Mahakam Prima Akbar Sejati (PT MPAS), dengan tuduhan pengrusakan lahan di atas milik PT Budiduta Agromakmur (PT BDAM), berlanjut. Kini dengan agenda mendengarkan saksi ahli, yang dihadirkan oleh terdakwa pada Senin (18/9/2023) sore.

Saksi ahli yang diketahui berasal dari perusahaan Primacon Explore, diyakini oleh tim kuasa hukum terdakwa memiliki kompetensi dibidang perizinan. Mulai dari awal dokumen hingga akhir, sampai perusahaan pertambangan batu bara bisa memulai produksi.

Namun dalam perjalanannya, diketahui keterangan dari saksi ahli pun ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yang menilai saksi ahli yang dihadirkan tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Lantaran JPU menilai saksi ahli bukanlah praktisi maupun akademisi. Karena berasal dari perusahaan atau lembaga profit.

"Kalau dalam persidangan wajar, saksi ahli tidak diterima jaksa karena ada pertimbangan lain. Secara umum menolak saksi karena tidak memiliki kompetensi menyampaikan itu, versi kita memiliki kompetensi yang cukup jadi

saksi," ujar Kuasa Hukum PT MPAS, Agus Talis Joni.

Agenda persidangan selanjutnya pun, dikatakan Agus Talis Joni, akan mendengarkan keterangan dari terdakwa Zulkifli pada pekan depan. Menjadi kesempatan terdakwa dan kuasa hukum untuk menggali dan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tenggaraong.

Sementara itu, saksi ahli yang dihadirkan terdakwa, Agus Siswanto, menanggapi santai hasil persidangan yang berlangsung. Ia menyebut bahwa sudah berkecimpung di dunia perizinan selama 18 tahun, sejak 2005 silam. Bahkan ia pun melengkap surat tugas, yang sebelumnya diminta oleh JPU pada persidangan pekan lalu.

"Saya dari 2005 sampai 2023, 18 tahun kemudian melakukan kegiatan proses perizinan pertambangan, apa yang disampaikan kuasa hukum tadi, saya bagian dari praktisi tersebut, dan kita juga melakukan proses perizinan," ujar Agus.

"Itu sebagai tolak ukur sebenarnya, ya kita kembalikan itu hak JPU," pungkasnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Tenggaraong.



Istimewa

Suasana sebelum pertandingan sepak bola wanita Bupati Cup 2023.

11 Tim Perebutkan Gelar Juara Turnamen Sepak Bola Wanita Bupati Cup 2023

TENGGARONG - Turnamen Sepak Bola Wanita Bupati Cup 2023, untuk pertama kalinya digelar di Kutai Kartanegara (Kukar). Berlangsung di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, turnamen ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni. Senin (18/9/2023).

Ali menjelaskan, turnamen sepak bola wanita ini merupakan rangkaian dari Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2023. Yang sebelumnya telah dibuka oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah.

"Kemarin kita sudah pembukaan dan sudah berlangsung Bupati Cup senior yang putra. Hari ini pembukaan Bupati Cup sepak bola wanita," ujar Ali.

Turnamen sepak bola wanita antar kecamatan se-Kukar ini, diikuti oleh 11 tim perwakilan kecamatan yang akan beradu strategi. Untuk memperebutkan gelar juara dengan sistem gugur.

Meski hanya 11 tim yang berkompetisi dari total 20 kecamatan di Kukar. Ali memaklumi absennya 9 kecamatan dari perhelatan sepak bola wanita ini. Ia sadar animo sepak bola wanita belum semasif sepak bola pria.

"Artinya ada 9 kecamatan yang saat ini tengah berproses dan mudah-mudahan tahun depan mereka bisa ikut," sebutnya.

Ali menambahkan, diselenggarakannya turnamen sepak bola wanita ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dispora. Dalam melakukan pembinaan terhadap perkembangan sepak bola wanita di Kukar.

Dengan berpartisipasi 11 kecamatan dalam turnamen ini, ia menilai bahwa perkembangan sepak bola wanita di Kukar sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pertandingan sepak bola wanita sudah kerap digelar, hanya saja belum pernah diselenggarakan oleh pemerintah.

"Makanya tahun ini kita laksanakan," sambungnya.

Selain itu, ia mengatakan kegiatan ini merupakan ajang menyeleksi bibit-bibit sepak bola wanita. Untuk dipersiapkan memperkuat Kukar dalam berbagai gelaran kompetisi sepak bola wanita.

"Tentunya ini menjadi kesempatan mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Dari sekian permainan ini pasti akan banyak menghasilkan pemain yang bisa mengharumkan nama Kukar di kancah sepak bola wanita," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Ketua PMI Kukar, Ismed.

Selama 8 Bulan, PMI Kukar Berhasil Kumpulkan 5.292 Kantong Darah Dari Ribuan Pendoror Baru

TENGGARONG- Hasil positif ditunjukkan Palang Merah Indonesia (PMI) Kutai Kartanegara (Kukar). Sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2023, berhasil mengumpulkan sebanyak 5.292 kantong darah.

Bahkan tidak hanya itu, Ketua PMI Kukar, Ismed, menyebutkan bahwa pihaknya mendata sudah ada 2.185 pendonor baru. Yang mulai memberanikan diri untuk melakukan donor darah.

"Ini semangat yang sangat luar biasa. Ada ribuan pendonor baru yang berani mendonorkan darahnya untuk pertama kali sampai bulan Agustus 2023. Terhitung hanya dengan 8 bulan saja," kata Ismed.

Ismed menjelaskan bahwa, capaian luar biasa ini tidak didapat dengan instan. Tapi dengan kerja keras dan ikhlas yang dilakukan oleh seluruh unit di PMI Kukar. PMI Kukar tidak hanya menunggu ditempat, tapi juga menjemput bola mengikuti berbagai event dan bekerja sama dengan instansi pemerintahan serta dunia usaha. Untuk mencari pendonor setiap tiga bulan sekali.

"Salah satu cara kami membuat program donor darah keliling, sehingga mampu memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan stok darah yang terkumpul akan digunakan para pasien dari bank darah yang ada di rumah sakit," terangnya.

Kerja keras ini membuahkan hasil manis. Dengan banyaknya jumlah pendonor, PMI

Kukar berhasil mencukupi kebutuhan stok darah di RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang.

"Alhamdulillah, permintaan darah melalui broadcast atau grup WhatsApp dan media sosial lainnya sudah sangat minim karena stok darah PMI terpenuhi dengan mekanisme yang diperbaiki," tambahnya.

Atas capaian luar biasa ini, PMI Kukar turut memberikan apresiasi pada seluruh pendonor. Karena telah ikhlas menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama. Apresiasi ini diberikan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PMI Ke-78. Dimana kegiatan ini berlangsung di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (17/9/2023) kemarin.

Penghargaan diberikan dalam tiga kategori secara berjenjang. Yang terbanyak, yang tertua dan yang termuda. Dirangkai dengan berbagai agenda dalam memeriahkan HUT PMI ke-78. Mulai dari zumba party, pemeriksaan kesehatan, donor darah, live musik, fun game hingga membagikan hadiah dan doorprize.

"Kalau ada 100 kali pendonor aktif akan mendapatkan Satya Lencana kemanusiaan dari Presiden Republik Indonesia. Rangkaian inilah yang kami kemas secara santai," tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : M Rafi'i



NGELUH SAKIT KEPALA, MAYAT PRIA DITEMUKAN DALAM KONTRAKAN DI GUNUNG TELIHAN

BACA HALAMAN A2



Tambahan Insentif RT Dipastikan Naik Oktober 2023, Segini Besarannya!



SYAKURAH/RADARBONTANG

Proses pemindahan mayat A ke RSUD.

Ngeluh Sakit Kepala, Mayat Pria Ditemukan Dalam Kontrakan di Gunung Telihan

BONTANG - Sesosok mayat berinisial A ditemukan meninggal dunia di dalam rumah kontrakannya, di Kelurahan Gunung Telihan, Jalan Denpasar 3, RT 09, Senin (18/9/2023).

Tetangga korban, Yuli Iskandar mengaku curiga saat A tidak keluar rumah pada jam 10.00 pagi, sehingga ia berinisiatif untuk membangunkan A sekalian menawarkan sarapan pagi.

Yuli berusaha mengetok pintu beberapa kali namun tidak ada respon. Sampai akhirnya ia memutuskan masuk ke rumah tersebut, dan ternyata menemukan A

meninggal dunia. Mayatnya sudah membiru dengan mulut mengeluarkan busa.

"Saya masuk karena pintu juga tidak dikunci, ternyata pas masuk A sudah kaku," jelasnya.

Tetangga korban mengakui, bahwa A merupakan orang yang cukup tertutup, namun tetap bersosialisasi dengan warga sekitar. Ia juga sering meminta tolong kepada Yuli semisal ingin pergi berobat.

Hari Minggu (17/9/23) sore kemarin ia sempat ditawari istrinya nasi goreng, dan memang kondisi A sudah mengeluh sakit kepala dan sedang meminum obat-

obatan. Sebab itu pagi tadi ia berinisiatif menawarkan sarapan. A hari-harinya bekerja sebagai tukang lepas, dan aslinya juga warga Bontang Kuala.

"Dia kemarin cuma bilang sakit kepala, tapi sebelumnya bilang kalau ada maag," jelasnya

Setelah ini jasad A akan dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang untuk di autopsi. Paman A, Suharno mengatakan almarhum akan dikebumikan di pemakaman umum Bontang Kuala.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva alam



Seluruh peserta TDUP dan Dispopar berfoto bersama usai sosialisasi.

Dispopar Adakan Sosialisasi TDUP untuk Pelaku Sektor Wisata

BONTANG - Bidang Pariwisata Dispopar Bontang mengadakan sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Rabu (13/9/2023) lalu bertempat di Ruang Rapat Dispopar Bontang.

Kegiatan ini mengundang para pelaku sektor pariwisata Kota Bontang seperti jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, jasa penyedia makanan/minuman dan lainnya. Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dispopar Bontang, Rita Atin Widiarti.

Sekretaris Dispopar Bontang menyampaikan, kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk para pelaku sektor pariwisata mengetahui pentingnya TDUP, sehingga bisa meningkatkan daya saing usaha pariwisata khususnya di Kota Bontang.

"Manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha dari TDUP ini yaitu, memiliki legalitas resmi yang diakui pemerintah, mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, bisa dimanfaatkan sebagai syarat dalam melaksanakan uji kompetensi usaha dan profesi yang dilakukan oleh LSP," beber Rita.

Ditambahkannya, adanya TDUP juga memudahkan pelaku usaha untuk bisa mengajukan proposal kegiatan juga tender ke para konsumen.

Adapun narasumber yang dihadirkan di antaranya dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Imam Rusdi Hidayat dan dari Politeknik Negeri Samarinda, I Wayan Lanang Nata. (al/adv)



Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam dukung rencana Gusung jadi objek wisata.

Rencana Gusung Jadi Objek Wisata, Rustam: Benahi Infrastrukturnya Dulu!

BONTANG - Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mendukung rencana pemerintah menjadikan Pulau Gusung sebagai objek destinasi wisata baru di Kota Bontang. Tetapi dirinya meminta agar infrastrukturnya dibenahi terlebih dulu.

"Saya pribadi dukung rencana itu. Potensi sumber daya dan kearifan lokal di Pulau Gusung sangat potensial dimanfaatkan lebih maksimal," ujarnya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, upaya ini sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan pariwisata Bontang.

Karenanya dia meminta agar pemerintah daerah bisa segera membenahi infrastruktur sarana dan prasarana di Pulau Gusung, sehingga layak dijadikan sebagai lokasi wisata.

Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu harus

membenahi aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang sejalan dengan rencana pengembangan potensi wisata di sana.

"Jangan sampai kita mau kembangkan wisatanya, tapi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan justru diabaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem mengatakan, rencana pengembangan potensi wisata Pulau Gusung saat ini tengah digodok.

Adapun tahap kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Pulau Gusung hampir rampung.

"Semua daerah yang berpotensi itu akan kami kembangkan. Seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Kami inginnya bisa seperti Malahing juga," terangnya. (al/adv)



Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mengusulkan kenaikan insentif RT.

Tambahan Insentif RT Dipastikan Naik Oktober 2023, Segini Besarannya!

BONTANG – Legislatif kembali menyuarakan usulan kenaikan insentif perangkat RT, guru mengaji, hingga Kader Posyandu. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang usai rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut BW sapaan akrabnya, usulan tersebut disampaikan kembali lantaran mereka kerap menanyakan kepastian kapan Insentif itu bisa segera diberikan

“Mereka sudah sering menanyakan insentif ini kepada saya. Saya tidak bisa jawab karena memang belum bisa memberikan kepastian. Saya minta tindak lanjutnya ini pemerintah seperti apa,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini insentif yang diterima oleh jajaran RT saat ini berkisar Rp1 juta, sedangkan besaran insentif untuk para kader dan guru mengaji saat ini ialah Rp150 ribu.

Menurutnya insentif itu masih terlalu kecil

sehingga perlu ditambah. “Harus ditambah, terlalu kecil itu. Ini juga kan sebagai bentuk perhatian pemerintah,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Basri menyebut akan menaikkan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan. Artinya, insentif yang akan diterima sebesar Rp1,1 juta.

“Tambahan Insentif RT kita rata semua Rp 100 ribu termasuk kader posyandu dan guru-guru ngaji,” tandasnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Bontang sudah memastikan akan menaikkan insentif RT di Oktober 2023 ini senilai Rp 100 ribu. Perangkat RT itu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, realisasi dengan insentif baru akan dilakukan pada Oktober 2023. Karena alokasi anggaran masuk dalam APBD Perubahan 2023 yang baru saja diketuk Rp 2,5 triliun. (al/adv)



SYAKURAH/RADARBONTANG

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Organisasi Wanita Bontang Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Peran Penting Perempuan Ajak Masyarakat ke TPS

BONTANG – Di pemilu tahun 2022 lalu, hanya hanya 70 persen masyarakat di Kaltim yang pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 100 persen yang terdaftar memiliki hak pilih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sigit Alfian mengatakan, sosialisasi ini penting, karena diharapkan pada tahun 2024 mendatang 100 persen warga Kaltim yang memiliki hak pilih bisa menggunakan suaranya.

Di Kota Bontang sendiri terdapat 131.595 pemilih, pemilih laki-laki sebanyak 68.135 dan pemilih perempuan sebanyak 63.459.

“Kami pinginnya masyarakat Kaltim bisa pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya di Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Organisasi Wanita Bontang Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Senin (18/9/23).

Alasan Kesbangpol memilih organisasi wanita Bontang sebagai peserta, karena perempuan dinilai memiliki kekuatan untuk mengajak dan menyebarkan informasi kepada keluarga dan sekitarnya.

“Selain dengan teman dan lingkungan sekitar, seorang perempuan yang merupakan ibu rumah

tangga diyakini pasti bisa memberitahu keluarganya untuk dapat pergi ke TPS saat pemilu nanti,” bebernya.

Ketika para pemilih hanya sedikit yang mau ke TPS, kinerja kesbangpol akan terlihat lemah karena tidak bisa merangkul masyarakat untuk melakukan pemilihan. Disadari selama ini sosialisasi pemilu hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.

“Selain itu saya ingin menyampaikan kepada mereka juga untuk melakukan pemilu yang damai, saya yakin kalau perempuan sudah bicara pasti didengar dan dilaksanakan,” tambahnya.

Dikatakan juga bahwa Kaltim ini rawan pemilu, artinya karena etnis yang begitu banyak, perpecahan lebih mudah terjadi jika tidak sependapat. Sehingga pendekatan akan semakin berat dan itu menjadi tugas Kesbangpol untuk menyatukan.

“Dengan melakukan pendekatan lewat para ibu-ibu rumah tangga ini, diharapkan bisa mempersatukan kita semua, jadi pengunjung TPS juga bisa meningkat,” harapnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



SYAKURAH/RADARBONTANG

Sigit alfian, Kepala Badan Kesbangpol.

Paskibra Studi Tour ke Bali November Mendatang

BONTANG – Pemkot Bontang memastikan tujuan study tour para anggota pasukan pengibar bendera (Paskibra) Kota Bontang adalah ke Bali.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sigit Alfian mengungkapkan, berdasarkan aturan perwali tiket perjalanan hanya sebesar Rp 3.5 juta. Kebetulan harga tiket pesawat ke Bali saat ini lebih murah sehingga bisa diberangkatkan.

Dikatakannya, pesawat menuju Bali dari Balikpapan tidak ada transit, hanya saja ketika pulangnya ada transit satu kali. Karena hanya sekali, dana perjalanan masih cukup.

"Rata-rata kalau ke daerah lain ada transit, kan lumayan, kita menyesuaikan harga juga agar cukup," jelasnya saat ditemui di Pendopo Rujab Wali kota, Senin (18/9/23).

Keberangkatan paskibra direncanakan

pada tanggal 13 November 2023 mendatang, masing-masing mereka nantinya akan menerima uang saku sebanyak Rp 300 ribu per hari.

"Nantinya mereka akan di sana selama 4 hari, totalnya jadi Rp 1.2 juta per orang," bebernya.

Tim yang berangkat berjumlah sekitar 80 anggota, dan karena mereka akan menjadi duta pancasila, di Bali mereka juga akan menerima sosialisasi terkait pancasila.

"Di sana mereka akan mendatangi tempat bersejarah juga, supaya sekaligus belajar tentang budaya," imbuhnya.

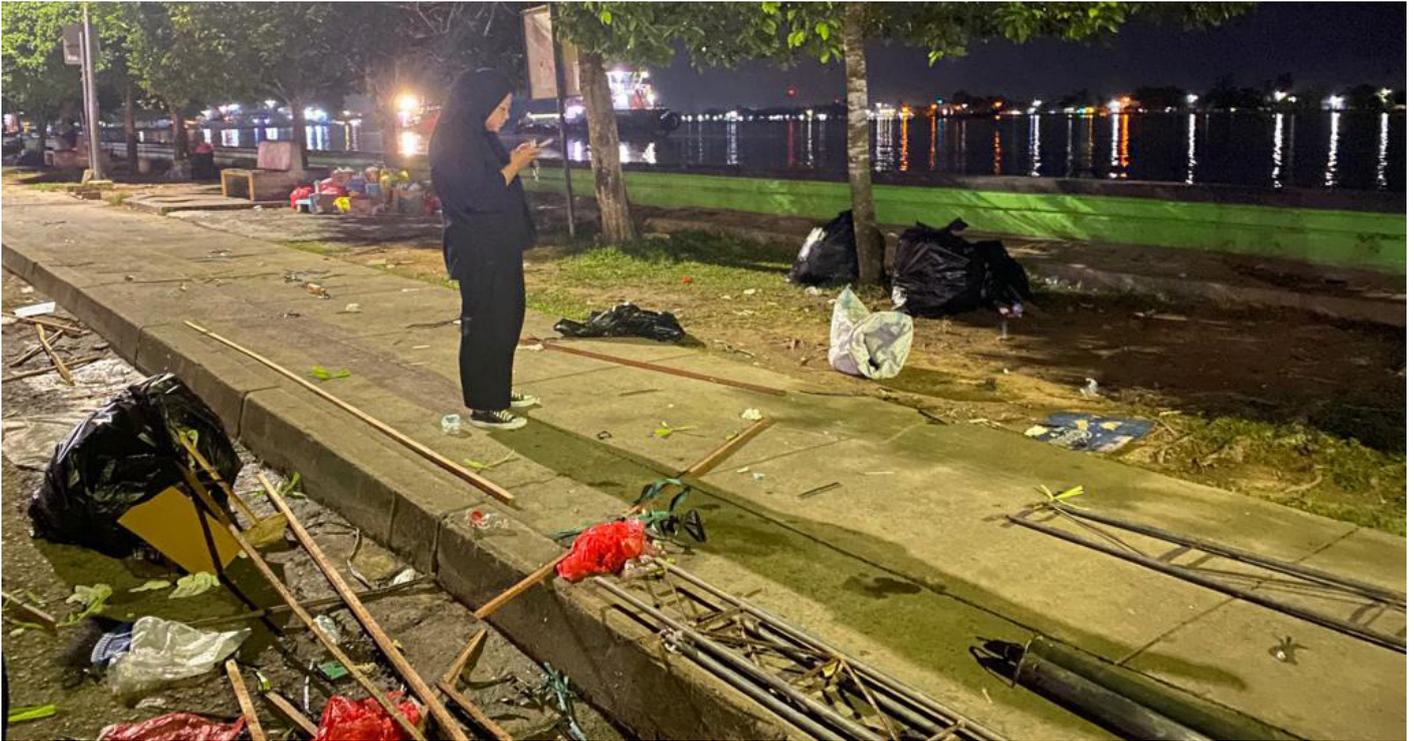
Dengan belajar di tempat bersejarah dan tempat wisata, diharapkan paskibra Kota Bontang bisa membantu pembangunan Kota Bontang yang juga sedang menuju kota wisata, sehingga dapat menggali potensi lainnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

DUH! SAMPAH BERSERAKAN DI TENGAH JALAN USAI ACARA IRAU MANUTUNG JUKUT



**DPRD APRESIASI 6 PROYEK
PERUBAHAN REFORMER**



Kondisi tepian Sungai Segah Jalan Pulau Derawan setelah acara Irau Manutung Jukut, banyak sampah dibiarkan.

DUH! SAMPAH BERSERAKAN DI TENGAH JALAN USAI ACARA IRAU MANUTUNG JUKUT

TANJUNG REDEB - Selepas acara Irau Manutung Jukut atau pesta rakyat membakar ikan beramai-ramai di sepanjang tepian Sungai Segah Kecamatan Tanjung Redeb Minggu (17/9/2023) lalu, terlihat banyak sampah menumpuk dan berserakan yang dibiarkan berada di tengah jalan oleh peserta Manutung Jukut.

Itu menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani. Seharusnya, kata dia, petugas kebersihan langsung membawa semua sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Bukan hanya pada event Manutung Jukut tapi setiap ada event apapun kalau bisa sampah harus selalu langsung dibersihkan. Agar Berau tetap bersih," katanya, Senin (18/9/2023).

Terlebih, acara Irau Manutung

Jukut menggunakan seluruh jalan, mulai dari Jalan Sangalaki, Jalan Pulau Derawan hingga Jalan Pulau Sambit untuk mendirikan tenda. Berdasarkan hasil sidaknya di sana, masih banyak sampah yang dibiarkan berada di tengah jalan setelah acara selesai.

Sisa sampah itu selain menyebabkan bau dan pemandangan tidak elok, jelas mengganggu pengguna jalan yang lewat.

"Kita perlu menjaga kebersihan agar Berau tetap bersih, lebih asri, indah dan nyaman dipandang mata," terangnya.

"Jangan malah mengotori tempat yang seharusnya menjadi tempat wisata, nongkrong dan tempat orang berjualan," imbuhnya.

Begitu juga dengan masyarakat yang menjadi peserta Irau Manu-

tung Jukut maupun pengunjung yang datang harus tetap menjaga kebersihan bersama.

"Dalam sambutan Bupati Berau ketika membuka acara kemarin sudah diimbau agar setelah acara ini tolong dijaga kebersihan dan kenyamanan di tepian. Tapi justru kesadaran masyarakat masih rendah," paparnya.

Dirinya berharap Kabupaten Berau dapat meraih penghargaan Adipura kembali. Setelah terakhir didapat pada 2019 lalu. Perlu kerjasama yang kuat antara pemda dengan masyarakat untuk menjaga Berau tetap bersih.

"Berau sudah lepas dari Adipura. Mudah-mudahan ke depan dengan sisa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Berau bisa kita peroleh kembali," tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Nicha Ratnasari



Penandatanganan kesepakatan mendukung proyek perubahan milik Kepala Disbun Berau, Lita Handini.

INOVASI PERBAIKAN LAYANAN, PEMKAB LUNCURKAN 6 PROYEK PERUBAHAN

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih meluncurkan 6 proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dari Kabupaten Berau. Hal ini diharapkan menjadi inovasi untuk perbaikan layanan yang semakin baik untuk masyarakat.

Sri Juniarsih memaparkan, proyek perubahan yang pertama yakni Kolaborasi Pengembangan Kakao untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Berau atau disingkat Si Bang Koko Mantap oleh Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini. Ini merupakan upaya kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini Dinas Perkebunan dan OPD terkait lainnya, bersama dengan pihak perusahaan swasta, mitra pembangunan (NGO), MPIC, dan perbankan dalam memberikan dukungan pengembangan pro-

duk olahan makanan berbahan coklat untuk mendukung sektor pariwisata.

Yang kedua, proyek perubahan berjudul Peluang Integrasi dan Kolaborasi untuk Transformasi Investasi di Kabupaten Berau atau disingkat PIKATI oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Nanang Bakran. Ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Berau yang terintegrasi dengan kolaborasi berbagai pihak dalam satu wadah yang bernama Mall Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan dapat menciptakan dunia investasi dan berusaha di Kabupaten Berau menjadi lebih baik.

Yang ketiga, Proyek Perubahan berjudul Strategi Peningkatan Infrastruktur Berbasis Geospasial atau disingkat Gitar Bergeol oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Fendra Firnawan. Di mana, Gitar Bergeol ini merupakan terobosan dalam memanfaatkan teknologi geospasial untuk mempercepat masa perencanaan infrastruktur secara menyeluruh tanpa mengurangi ketelitian. Sehingga, memberi keleluasaan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan supaya dapat terlaksana secara maksimal.

Yang keempat, Proyek Perubahan berjudul Tertib dan Aman Bersama Satpol PP atau disingkat Teman Pol PP oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Berau, Anang Saprani. Inovasi ini merupakan sosialisasi berkelanjutan dalam hal penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan aturan lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang kelima, Proyek Per-

Lanjutan Inovasi

bahan berjudul Strategi Peningkatan Literasi melalui Perpustakaan yang Aktif, Kreatif, Edukatif, dan Menarik atau disingkat Si Pena Pakem oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau Yudha Budi Santosa. Adalah proyek perubahan yang menghadirkan konsep perpustakaan yang aktif berkegiatan, mengasah kreativitas dan mengedukasi pengunjung, sehingga meningkatkan daya tarik perpustakaan.

“Si Pena Pakem ini juga bersinergi dengan perangkat terkait untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca dan literasi masyarakat untuk menderdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya, Senin (18/9/2023).

Terakhir, Proyek Perubahan berjudul Membangun Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Daerah atau disingkat Bang Si Perda oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM Jaka Siswanto. Adalah inovasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau di bidang Retribusi Daerah dan mewujudkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan, dengan memaksimalkan pemungutan retribusi sesuai potensi yang ada untuk peningkatan PAD, memberikan kemudahan layanan khususnya bagi pelaku UMKM, hingga meminimalkan kebocoran retribusi.

“Saya minta para reformer untuk memastikan kesiapan sumber daya pelaksana proyek perubahan ini sekaligus memastikan keberlanjutan dan target pencapaiannya,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Disbun Berau Lita Handini menjelaskan, proyek perubahan yang dibuatnya berdasarkan analisisnya

bahwa setiap tahun luas lahan kakao di Berau semakin berkurang. Pada tahun 2018 luasnya mencapai 2.475 hektare, dan sekarang tinggal 1.003 hektare saja.

Sehingga, pihaknya perlu melakukan langkah untuk mempertahankan luas lahan yang ada. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk melakukan pembinaan dan dukungan kepada petani kakao Berau sehingga mereka merasa dibimbing dan didukung.

“Jadi para petani bisa tetap konsisten mengembangkan kakao itu,” ucapnya.

Di samping itu, pihaknya akan meng-SK-kan sekitar 600 hektare lahan kakao yang dipetakan di Kabupaten Berau soal penetapan lahan kawasan. Yang mana akan diprioritaskan untuk didukung dengan berbagai bantuan dari pemda.

“Jadi di situ sudah jelas bantuannya apa dan berapa karena lahannya sudah tercatat dalam SK Bupati,” urainya.

SK tersebut diungkapkannya masih diproses. Yang targetnya akan dirampungkan pada September ini. Lahan potensial selain yang akan tercatat dalam SK juga tetap dipetakan. Untuk dipertahankan dan tidak pindah komoditas.

Sehingganya, tahun depan setelah SK penetapan lahan kawasan kakao, akan dibentuk tim untuk melanjutkan kegiatan pemetaan lahan potensial kakao lainnya.

“Lahan potensi yang lahannya jelas dan petaninya punya niat untuk mengembangkan kakao. Siapa tahu sebanyak 1.003 hektare lahan kakao yang ada bisa dipetakan semua,” tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Berau Madri Pani melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk mendukung kelanjutan proyek perubahan salah satu reformer.

DPRD APRESIASI 6 PROYEK PERUBAHAN REFORMER

TANJUNG REDEB - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani mengapresiasi enam proyek perubahan yang telah diluncurkan Pemkab Berau, milik 6 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).

Madri berharap ke depan supaya para peserta PKN dapat bekerja lebih profesional, inovatif dan kreatif dalam mengembangkan proyek perubahan sesuai yang sudah diluncurkan hari ini.

"Tentunya untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Berau dalam membangun Berau," ucapnya, Senin (18/9/2023).

Dirinya menilai semua proyek perubahan yang telah dipaparkan sudah cukup bagus, sebagai inovasi untuk perbaikan pelayanan pemerintahan yang semakin baik untuk masyarakat.

Namun, satu proyek perubahan yang menjadi perhatiannya yakni Strategi Peningkatan Infrastruktur Berbasis Geospasial atau disingkat Gitar Bergeol oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dari Fendra Firnawan.

Menurutnya, ide Kepala DPUPR Berau tersebut sangat bagus. Karena mampu mengedepankan hubungan internal dan eksternal melalui proses dari bawah.

"Kalau saya melihat idenya sangat bagus. Apalagi dapat mengefisiensikan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang mana dapat mempercepat serapan anggaran daerah," ungkapnya.

DPUPR sendiri tahun ini mengelola APBD terbesar diantara instansi lain yakni sebesar Rp 1,5 triliun. Disadari Madri, untuk mengelola anggaran yang sangat besar butuh kerjasama dan sinergitas antara bawahan dengan atasan. Supaya pekerjaan benar-benar lebih detail dan teliti.

Secara khusus Madri juga mendorong para kepa-

la dinas lainnya dalam membuat ide atau gagasan yang diimplementasikan dalam sebuah inovasi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentunya untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Berau menjalankan roda pemerintahan.

Terpisah, Kepala DPUPR Berau Fendra Firnawan menjelaskan, proyek perubahan Gitar Bergeol miliknya merupakan strategi perencanaan skala besar dengan pengumpulan data-data terkait rencana yang pernah dibuat maupun rencana yang belum pernah ada pada suatu jenis kegiatan infrastruktur di kabupaten Berau.

"Strategi perencanaan dikelola secara digital berbasis teknologi informasi agar dapat mengefisienkan waktu, biaya, kuantitas, kualitas," terangnya.

Adapun inovasi yang digunakan yakni menggunakan software Autodesk Civil 3D. Telah memiliki fasilitas dan fleksibilitas untuk perencanaan jalan yang sangat memudahkan karena dapat diperbaharui secara real time atau waktu sebenarnya. Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyusunan perencanaan.

Tujuan dalam jangka pendek terdapat gambaran perencanaan infrastruktur secara digital di pilot project pada Kecamatan Kelay dan Kecamatan Pulau Derawan. Yang merupakan lokasi titik andalan wisata bahari maupun sejarah purba kala. Serta tersusunnya kebijakan strategis tentang perencanaan infrastruktur berbasis geospasial.

"Sedangkan, jangka panjangnya dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur secara cepat, tepat dan up to date yang sesuai kebutuhan, berbasis data yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi," tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari



TILANG MANUAL DOMINASI OPERASI ZEBRA MAHAKAM 2023 DI BALIKPAPAN



**AKSI PREMANISME TERJADI
DI BALIKPAPAN, KORBAN
DIPUKULI HINGGA BERDARAH**



Polisi melakukan tindakan preventif saat digelar operasi Zebra Mahakam beberapa waktu yang lalu.

TILANG MANUAL DOMINASI OPERASI ZEBRA MAHAKAM 2023 DI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Operasi Zebra Mahakam 2023 resmi berakhir pada 17 September 2023 kemarin. Dari operasi yang digelar masih banyak pengendara di Kota Balikpapan yang melakukan pelanggaran.

Kasatlantas Polresta Balikpapan, Kopol Ropiyani mengatakan, selama dua pekan berlangsung jajarannya telah mengeluarkan sebanyak 406 surat tilang kepada pelanggar.

"Dari jumlah itu ada dua tindakan yaitu secara E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) maupun manual," ujarnya, Senin (18/9/2023).

Lebih lanjut Ropiyani menjelaskan, yang mendominasi dari angka itu adalah penilangan manual. Disebutkannya selama operasi polisi menindak sebanyak 364 pelanggar.

"Kalo untuk E-TLE terdapat 42 pelanggar," jelasnya.

Dalam operasi Zebra Mahakam polisi juga lebih mengedepankan tindakan preventif, artinya tidak

serta merta melakukan penilangan di lapangan.

Lebih lagi, hanya terdapat 7 pelanggar prioritas yang menjadi target dalam operasi ini, seperti tidak menggunakan helm SNI, pengendara melawan arus, pengendara di bawah umur, berkendara di bawah pengaruh alkohol alias mabuk.

Kemudian pengendara melanggar rambu lalu lintas, pengendara tanpa safety belt untuk roda empat, serta berkendara lebih dari dua orang untuk roda dua.

"Ketujuh pelanggaran prioritas itu masuk kedalam pelanggaran serius yang berpotensi terhadap fatalitas jika terjadi kecelakaan," tambahnya.

Maka, jika pelanggarannya tidak serius atau tidak berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan polisi lebih mengutamakan tindakan preventif atau hanya memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis, serta memberikan edukasi kepada warga.

"Untuk teguran tertulis selama Operasi Zebra kami menghimpun ada 667 teguran," ujar Ropiyani lagi.

Dirincikannya, dari 667 teguran secara tertulis terdapat 127 pelanggar dan 540 kasus untuk teguran secara lisan.

Dari keseluruhan pelanggaran yang tercatat oleh pihaknya itu diakui didominasi oleh pengendara roda dua dengan jenis pelanggaran seperti melawan arah, hingga berbelok di kawasan yang jelas dilarang.

Untuk mengantisipasi dan menekan angka pelanggaran lalu lintas di kemudian hari, polisi melakukan sosialisasi dengan menyebar flyer dan memasang spanduk tentang imbauan tertib berlalu lintas.

"Dan di malam harinya kami juga rutin melakukan patroli di beberapa kawasan yang dianggap rawan terhadap aktivitas balap liar oleh warga," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Monitoring Ditreskoba Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan di Posko Kampung Bebas Narkotika di Balikpapan Barat.

KAMPUNG BEBAS NARKOTIKA EFEKTIF TEKAN PEREDARAN NARKOTIKA DI BALBAR

BALIKPAPAN - Wilayah Gunung Bugis yang berada di Balikpapan Barat terkenal dengan maraknya peredaran narkoba jenis sabu. Sejumlah upaya pun dilakukan jajaran kepolisian, BNN hingga pemerintah kota untuk mengentaskan peredaran narkoba tersebut.

Kampung Bebas Narkoba pun hadir di Gunung Bugis, Balikpapan Barat untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Dua kampung bebas narkoba pun telah diluncurkan jajaran Polresta Balikpapan sejak 2019 lalu dan kini sudah ada berjumlah 2 kampung yang dideklarasikan sebagai kampung bebas narkoba.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim, AKBP Fajar Nuardimi mengatakan, sejak adanya kampung bebas narkoba peredaran

narkoba di Gunung Bugis bisa ditekan. Bahkan program dan sosialisasi yang digalakkan Polres dan jajaran terus dilakukan untuk mencegah adanya peredaran narkoba.

"Sangat efektif sekali, terbukti peredaran narkoba semakin berkurang di sini," ujarnya, Senin (18/9/2023).

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, tingkat keberhasilan penekanan narkoba di wilayah Balikpapan Barat ini sebesar 80 persen.

"Kalau kita terus menjalankan program dan sosialisasi terus dilakukan tidak menutup kemungkinan bisa zero peredaran narkoba," jelasnya.

Sementara itu salah seorang anggota Pokja Pemberantasan Narkoba wilayah Balikpapan Barat, Umar Saleh mengatakan, sebanyak 3 RT di kawasanya

saat ini telah bebas dari peredaran narkoba. Padahal sebelumnya banyak terjadi peredaran narkoba dikawasannya.

"Sebelum ada kampung bebas narkoba ini RT 9, RT 10 dan RT 15 ini banyak ditemukan peredaran narkoba. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi," ujarnya.

Saat ini Pokja Pemberantasan Narkoba wilayah Balikpapan Barat akan terus mengencangkan program dan sosialisasi pencegahan narkoba di wilayah Balikpapan Barat pada umumnya dan Balikpapan khususnya.

"Sampai akhir tahun ini kita sudah siapkan program dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di wilayah kita," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Korban pemukulan, Nuruddin saat mendampingi Makopolresta Balikpapan, Senin (18/9).

AKSI PREMANISME TERJADI DI BALIKPAPAN, KORBAN DIPUKUL HINGGA BERDARAH

BALIKPAPAN – Aksi premanisme terjadi di Kota Balikpapan pada Sabtu (16/9/2023). Di mana korban bernama Nuruddin (53) mengalami luka lebam pada bagian wajahnya hingga harus menerima 5 jahitan.

Korban yang ditemui di Polresta Balikpapan pada Senin (18/9/2023) mengatakan, saat kejadian dirinya sedang berjalan-jalan di sekitar lahannya yang berada di Jalan Al Makmur RT 32 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota.

“Tahu-tahu datang 2 orang nanya saya, Nuruddin ya? Saya jawab ia. Langsung saya dipukul berdua orang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Nuruddin menjelaskan, ia pun tidak mengenali kedua orang yang telah memukulinya hingga berdarah-darah. Bahkan warga yang melihat langsung meleraikan kejadian tersebut.

“Karena masih sore, sekitar jam 5-an, saya langsung lapor ke Polres. Baru diarahkan ke rumah sakit untuk membuat visum,” jelasnya.

Korban mengaku sejauh ini tidak memiliki masalah dengan siapapun. Bahkan terkait hal apapun. Untuk itu, ia meminta kepolisian dapat mengungkap kasus ini dan mengamankan pelakunya.

“Saya tidak pernah ribut atau bermasalah sama orang, makanya saya kaget. Kok tiba-tiba dipukul. Saya berharap kepolisian bisa menangkap pelaku dan mengungkap aksi premanisme ini lah. Karena saya harus minta tolong ke siapa lagi kalau tidak ke polisi kan,” tambah Nuruddin.

Sementara itu, Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan, IPDA Wemy Ardeta saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dari korban perihal kasus pemukulan oleh orang tak dikenal.

“Iya ada. Hari Sabtu usai kejadian dia langsung buat laporan di kami,” ujarnya.

Wemy menambahkan, atas laporan tersebut hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sedikitnya 3 orang. Dan sudah mendapatkan ciri-ciri dari kedua pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban.

“Sudah ada saksi yang kita periksa. Ada 3, warga disaat kejadian dan Pak RT setempat. Kita juga sudah identifikasikan ciri-ciri pelakunya. Dan saat ini dalam tahap penyelidikan kami,” tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus Susanto



BUPATI PASER TERIMA HIBAH 655 PJUTS DARI KEMENTERIAN ESDM



941 PTT DI PASER BAKAL SELEKSI PPPK



TBupati Paser, Fahmi Fadli menandatangani berita acara

BUPATI PASER TERIMA HIBAH 655 PJUTS DARI KEMENTERIAN ESDM

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melakukan penandatanganan berita acara serah terima hibah barang milik negara. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Paser Fahmi Fadli bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan, kegiatan pembangunan PJUTS merupakan program dari Pemerintah Pusat yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. "Pembangunan itu tidak lain guna kebutuhan akan penerangan jalan umum yang ada di desa-desa," terang Fahmi.

Sejauh ini, sudah ada ratusan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang terbangun di Kabupaten Paser dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 telah terpasang PJUTS di 365 titik, dan di

tahun 2022 sudah terpasang 290 titik.

"Total yang terpasang sudah ada 655 titik yang tersebar pada beberapa desa di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Paser," ulasnya.

Dengan adanya serah terima hibah PJUTS yang dilakukan, Bupati Paser berharap agar giat serupa bisa dilakukan di tahun berikutnya. "Supaya bisa menyentuh desa-desa lainnya secara merata, agar pemerataan akan penerangan jalan umum bagi masyarakat bisa terpenuhi," harap Bupati Paser.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Paser Fahmi Fadli didampingi Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana bersama Kabag SDA Setda Amri Yulihardi.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito

941 PTT DI PASER BAKAL SELEKSI PPPK

PASER - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser akan melakukan seleksi terhadap 941 Pegawai Tetap (PTT) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

"Seleksi dilaksanakan secara bertahap, tahun ini kuotanya 941 pegawai," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito, Senin (18/9/2023).

Ia merincikan jumlah kuota *ebanyak 941 itu terdiri dari 545 untuk formasi guru, 321 tenaga kesehatan dan 75 tenaga teknis. Suwito mengatakan saat ini jumlah PTT di Kabupaten Paser berjumlah 4.086 orang. Data itu diperoleh setelah proses penghimpunan secara bertahap.

Menurutnya seleksi P3K ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kepala daerah seluruh Indonesia untuk tidak memberhentikan PTT yang ada. "Artinya tidak ada pemutusan tenaga honorer atau PTT," kata

Suwito.

Ia menegaskan, sistem pengangkatan pegawai berstatus P3K ini diatur pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi.

"Jadi semua aturan dari Badan Kepegawaian Nasional dan daerah hanya melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan. Tugas kami hanya memeriksa berkas yang menjadi syarat para peserta yang diseleksi," ujar Suwito.

Ia menambahkan, pengangkatan pegawai berstatus P3K digelar secara bertahap dengan memprioritaskan pada kebutuhan aparatur di layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pengangkatan P3K ini, diharapkan permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Paser tuntas dan tidak ada lagi honorer kedepannya.

"Untuk seleksi P3K saat ini di fokuskan untuk PTT yang sudah ada karena selama ini menjadi keresahan," ucap Suwito. (bs)



Komisioner KPU Kabupaten Paser, Ahyar Rosidi

NIHIL TANGGAPAN MASYARAKAT, KPU PASER LANJUT KE PROSES DCT

PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser memastikan tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Paser, Ahyar Rosidi mengatakan, pihaknya tidak ada menerima tanggapan publik terhadap DCS yang diluncurkan pada 19 hingga 23 Agustus 2023, sesuai tahapan yang telah ditentukan.

"Sampai dengan saat ini usai diumumkan para nama DCS, tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat yang masuk ke KPU Paser," kata Ahyar.

Sehingga, diterangkan Ahyar, KPU Kabupaten Paser langsung fokus pada proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) terhadap 367 bacaleg menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang akan ditetapkan pada Oktober 2023 mendatang.

"Jadi kita langsung ke proses penetapan DCT," terangnya..

Dalam proses penetapan DCT, KPU Kabupaten Paser akan melakukan pencermatan DCT. Di masa pencermatan DCT tersebut, memungkinkan para Partai Politik (parpol) bisa melakukan pergantian Caleg tanpa menambah jumlah yang ada.

"Jadi pada masa itu bisa melakukan pergantian namun tidak dapat melakukan penambahan nama Bacaleg dan untuk SK Pemberhentian tidak diperkenankan lewat dari tanggal yang telah ditetapkan," ujarnya.

Diketahui jumlah keseluruhan DCS sebanyak 367 bacaleg dari 17 parpol yang ada di Kabupaten Paser. Dari 17 Parpol tersebut sebanyak 8 parpol yang tidak memaksimalkan jumlah Bacaleg nya untuk maju di Pemilu 2024 yakni PKN, Buruh, PSI, Hanura, Perindo, Ummat, PBB, PPP.

Sementara kebutuhan kursi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Paser sesuai dapil, diantaranya Dapil 1: 9 kursi, Dapil 2: 8 kursi, Dapil 3: 7 kursi, Dapil 4: 6 kursi.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari